

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kemiskinan ialah suatu kondisi tidak mempunya seseorang ataupun masyarakat dalam mencukupi standar kebutuhan di kehidupannya sehari-hari. Kemiskinan telah menjadi permasalahan utama yang terdapat di negara-negara belahan dunia, khususnya di negara berkembang. Hal tersebut disebabkan karena masih banyaknya jumlah penduduk yang berada di bawah dari garis kemiskinan yang berpendapatan rendah di bawah rata-rata. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nurkse pada teorinya yaitu lingkaran setan kemiskinan menyatakan bahwa kemiskinan terjadi dikarenakan adanya keterbelakangan, pasar yang tidak sempurna dan rendahnya modal disebabkan oleh rendahnya produktivitasnya yang masih rendah. Masih rendahnya produktifitas akan berdampak pada pendapatan yang diterima semakin sedikit, hingga kemudian menyebabkan tabungan dan investasi yang rendah. Rendahnya investasi menyebabkan munculnya keterbelakangan serta rangkaian permasalahan kemiskinan yang tiada hentinya.

Kemiskinan juga menjadi permasalahan yang mencakup sosial ekonomi di negara-negara maju tetapi relatif berbeda dengan keadaan permasalahan yang terjadi pada umumnya di negara berkembang, terlebih menjadi perhatian penting bagi pemerintah karena merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan analisis dan strategi yang berkelanjutan dalam memberikan kebijakan untuk menanggulangnya. Masalah kemiskinan perlu untuk diselesaikan secara langsung, mengingat bahwa tolak ukur maju atau tidaknya sebuah negara dilihat dari pendapatan perkapitanya dalam mencukupi kebutuhan dasarnya yang layak untuk didapatkan. Permasalahan kemiskinan umumnya terjadi diakibatkan oleh kurang mempunya suatu wilayah dalam memanfaatkan sumber daya alamnya dengan baik dan keterbatasan pada penyediaan faktor-faktor produksi yang tercermin pada tingkat PDRB di suatu wilayah. Apabila di suatu negara jumlah penduduk miskinnya tinggi dan memiliki pendidikan yang rendah, akan berdampak pada semakin berkurangnya SDM yang memiliki keterampilan-keterampilan tertentu

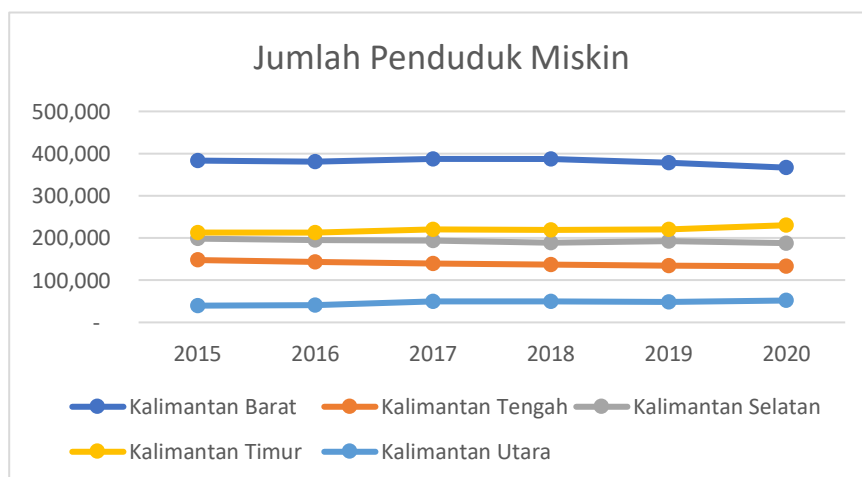
dan akan menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki di suatu negara (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018). Jumlah kemiskinan yang tinggi dapat mengakibatkan pengeluaran biaya yang besar dalam melakukan pembangunan ekonomi, yang secara langsung akan menghambat proses pembangunan tersebut. Permasalahan kemiskinan pada akhirnya akan mempengaruhi perekonomian di suatu negara, karena merupakan indikator penting dalam mengukur kemampuan perekonomian terutama dalam melakukan analisis-analisis yang berkaitan dengan hasil perencanaan pembangunan ekonomi yang telah diterapkan pada suatu negara (Novriansyah, 2018).

Indonesia merupakan negara berkembang yang dimana masih terdapat persoalan kemiskinan yang terdapat di beberapa provinsi. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia masih terbilang tinggi yaitu sebesar 27,55 juta orang pada September 2020, meningkat sebesar 2,76 juta orang dari September 2019 (Badan Pusat Statistik, 2021). Jumlah penduduk miskin yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia lebih didominasi oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan dan umumnya bekerja di sektor pertanian dan berpusat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) terlebih di Pulau Sumatera dan Jawa. Hal tersebut disebabkan separuh penduduk lebih yang ada di Indonesia tinggal pada kedua pulau tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan juga di beberapa provinsi atau pulau lainnya di Indonesia memiliki permasalahan yang sama terhadap jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 sebagai arah kebijakan pokok pembangunan nasional adalah dengan mendorong transformasi dan percepatan yang berfokus di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), khususnya wilayah Kalimantan yang menyumbang kontribusi ekonomi terbesar terhadap perekonomian secara nasional (Ayu, Mulatsih, & Novianti, 2021). Pada tahun 2019, kontribusi ekonomi pada wilayah KTI terhadap nasional mencapai sebesar 19.3 persen dengan 8.1 persen berasal dari Kalimantan, namun angka kemiskinan yang dapat dilihat berdasarkan jumlah dari seluruh penduduk miskin di Kalimantan masih terbilang cukup tinggi.

Seperti halnya dengan Provinsi Kalimantan Barat yang menempati peringkat 17 (tujuh belas) dengan jumlah penduduk miskin tertinggi se-provinsi di Indonesia dan menjadi provinsi yang menempati peringkat pertama dengan jumlah

penduduk tertinggi melebihi provinsi-provinsi lainnya yang ada di Pulau Kalimantan. Jumlah penduduk miskin secara keseluruhan yang berada di Kalimantan Barat telah mencapai sebanyak 366.770 jiwa atau sebesar 7,17 persen pada Maret tahun 2020 (BPS, 2020). Provinsi tersebut menjadi salah satu provinsi dengan letak dan posisinya yang strategis di kawasan Kalimantan secara regional dikarenakan secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura yang menjadi negara tetangga bagi Indonesia, hingga menjadikan provinsi tersebut sebagai salah satu garda utama bagi negara Indonesia dalam menyambut MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) untuk meningkatkan pasar tenaga kerja yang lebih luas antar negara. Terdapat sisi positif yang bisa didapatkan dari pelaksanaan MEA, baik secara nasional maupun regional di Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Salah satunya adalah mampu meningkatkan potensi pertumbuhan investasi yang menyebabkan lapangan pekerjaan semakin meningkat jumlahnya hingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Masyarakat juga dengan mudah akan mendapatkan pekerjaan di luar negeri sebagai bentuk kerja sama antar negara yang lebih luas dan akan menyebabkan pendapatan yang diterima semakin tinggi, hingga berdampak pada menurunnya angka kemiskinan (Agustin, 2018).

Grafik 1. Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Kalimantan Tahun 2015-2020 (Jiwa)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan pada grafik di atas, terlihat bahwa Provinsi Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan penduduk miskin yang jumlahnya paling tertinggi

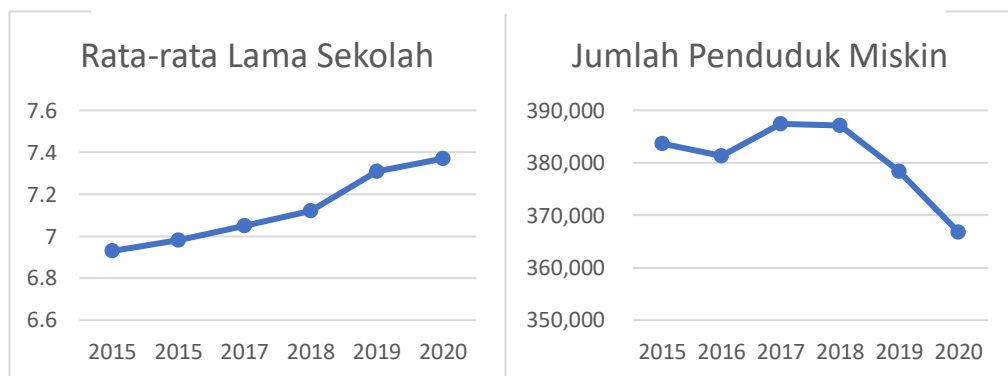
daripada provinsi lainnya yang terdapat di Pulau Kalimantan pada tahun 2020 sebesar 366.770 jiwa, disusul oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar 230.270 jiwa dan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 187.874 jiwa. Jumlah penduduk miskin yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat telah mengalami fluktuasi yang cenderung menurun pada periode 2015 sampai dengan 2020. Hal tersebut menandakan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki tingkat kemiskinan yang masih terbilang cukup tinggi walaupun berarti bukan yang terburuk. Penyebab utama masih cukup tinggi tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat adalah kurang berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ditambah lagi kurang memadainya beberapa fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan raya, gedung sekolah dan lain sebagainya sehingga membuat produktivitas masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat rendah.

Jumlah penduduk miskin yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2016 telah terjadi penurunan yang menjadi sebesar 381.350 jiwa, lalu penurunan juga terjadi pada periode 2018 yang bertambah menjadi sebanyak 387.080 jiwa dan di periode 2019 juga mengalami penurunan menjadi sebanyak 378.410 jiwa. Hal tersebut disebabkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat lebih memprioritaskan penanggulangan permasalahan kemiskinan di daerah pedesaan karena jumlah penduduk miskin yang tinggal di desa jauh lebih tinggi angkanya dari pada penduduk miskin yang tinggal di wilayah kota. Penyebab dari perbedaan yang cukup besar antara jumlah penduduk miskin yang tinggal di pedesaan dan perkotaan adalah belum meratanya pembangunan antar daerah yang berdampak pada terjadinya ketimpangan di kedua wilayah tersebut. Dilihat pada periode 2017, jumlah penduduk miskin telah mengalami peningkatan hingga sebanyak 387.430 jiwa yang disebabkan terjadi peningkatan penduduk miskin yang tinggal di pedesaan sebanyak 8.210 jiwa dan jumlahnya mencapai sebesar 311.270 jiwa. Hal tersebut disebabkan terbatasnya infrastruktur dan belum tersedianya sarana pendukung yang diberikan pemerintah dalam aspek pendidikan dan kesehatan, sehingga standar hidup layak masyarakat di pedesaan belum terpenuhi (BPS, 2017).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah menerapkan agenda dan program pembangunan perekonomian dengan berbasis pada sektor agrikultur mengingat bahwa sektor tersebut merupakan sektor unggulan yang akan menjadi

topangan terbesar bagi perekonomian di kawasan tersebut sebagai aspek yang akan menurunkan tingkat kemiskinan. Program yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi tersebut sebagai agenda pembangunan ekonomi berbasis sektor pertanian salah satunya adalah dengan merealisasikan kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan. Program tersebut pelopori oleh Kementerian Pertanian yang harapannya dapat mengembangkan sektor agrikultur agar dapat menopang perekonomian dengan baik, terlebih lagi untuk menjaga ketahanan pangan dan menjadi pemacu dalam pembangunan ekonomi yang akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi yang angka kemiskinan masih terbilang cukup tinggi diakibatkan rasio belanja modal yang diperuntukkan sektor agrikultur masih relatif rendah. Salah satu aspek lainnya yang dapat mendukung pemberantasan kemiskinan adalah dengan tersedianya data-data kemiskinan yang jitu sebagai dasar estimasi untuk memberikan prosedur dan strategi yang mutakhir untuk membandingkan angka kemiskinan pada setiap tahunnya (Ferezagia, 2018).

Grafik 2. Rata - Rata Lama Sekolah dan Jumlah Penduduk Miskin di Kalimantan Barat Tahun 2015-2020 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan pada grafik di atas, terlihat bahwa pada periode 2015 sampai dengan 2020 rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Barat telah terjadi peningkatan secara signifikan pada setiap periodenya. Hal tersebut mampu dilihat dari lamanya waktu tempu penduduk dalam mengenyam pendidikan yang rata-ratanya mencapai 7,37 tahun di periode 2020, bertambah sebanyak 0,06 poin dibandingkan dengan tahun 2018 yang jumlahnya sebesar 7,31 tahun.

Peningkatan tersebut disebabkan oleh program sekolah gratis kepada seluruh siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai wujud meningkatkan pendidikan (Ayu, Mulatsih, & Novianti, 2021).

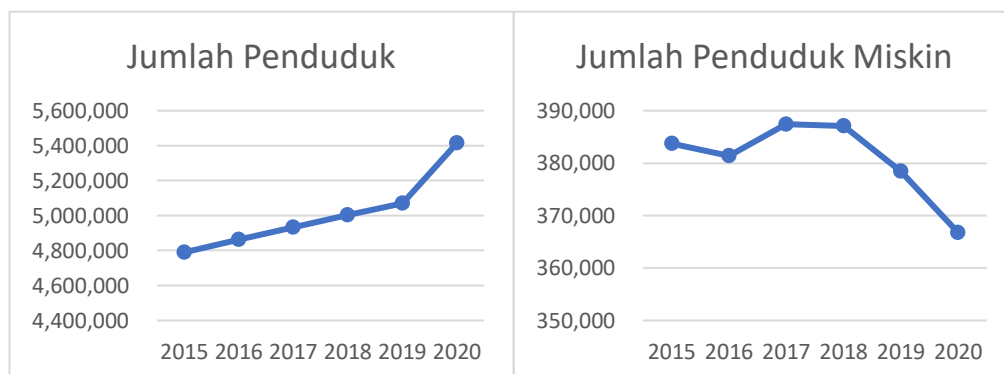
Peningkatan rata-rata lama sekolah menandakan bahwa makin besarnya jumlah penduduk yang telah menamatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga pengetahuan dan keahliannya juga tinggi. Pengetahuan dan keahlian yang tinggi dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan kesempatan bekerja sehingga jumlah penduduk miskin akan menurun. Pendidikan dapat berperan sebagai suatu cara agar dapat memaksimalkan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan berkualitas, hal itu akan membuat perekonomian akan berjalan dengan baik yang dilihat dari semakin meningkatnya keterampilan yang dimiliki masyarakat pada bidang-bidang tertentu yang dapat menunjang dunia kerja. Pendidikan pada hakikatnya mempunyai peran yang esensial agar dapat memudahkan masyarakat dari sisi perekonomian dan status sosialnya di masyarakat apabila memiliki status pendidikan yang baik (Ariani & Juliannisa, 2021).

Menurut penelitian sebelumnya, rata-rata lama sekolah menunjukkan adanya pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dikarenakan mencerminkan kualitas pendidikan sebagai modal utama dalam mencapai keberhasilan perekonomian di suatu negara dan menjadi investasi dalam bentuk modal manusia yang akan berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan (Azizah, Sudarti, & Kusuma, 2018). Schultz mengatakan dalam teorinya bahwa semakin tinggi pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah akan menyebabkan jumlah dari kemiskinan akan berkurang. Kenyataannya kondisi tersebut selaras dengan keadaan yang telah terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, di mana berdasarkan grafik di atas ditunjukkan kalau lamanya waktu pendidikan formal yang dijalankan oleh masyarakat di provinsi tersebut secara rata-rata telah meningkat dengan signifikan pada masing-masing periodenya, sedangkan jumlah penduduk miskin yang terdapat di tersebut terjadi fluktuasi yang cenderung menurun pada setiap tahunnya.

Walaupun rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Barat meningkat pada masing-masing periodenya, apabila dilihat di periode 2017 rata-rata lama

sekolah masyarakat di Kalimantan Barat yang memiliki usia 15 tahun lebih mencapai sebesar 7.05 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa penduduk Kalimantan Barat secara rata-rata hanya mampu menjalankan pendidikan sampai ke jenjang 1 SMP. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Kalimantan Barat tahun 2017, jenjang pendidikan yang paling banyak ditempuh oleh penduduk berada di jenjang Sekolah Dasar (SD) ke bawah yang mencapai sebesar 53,02 persen, lalu penduduk yang berumur 15 tahun lebih yang menamatkan jenjang pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya mencapai sebesar 16,51 persen dan penduduk yang menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) telah mencapai sebesar 15.88 persen (BPS, 2017). Hal tersebut menandakan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih terbilang cukup rendah dan menyebabkan kesempatan kerja masyarakat menjadi rendah dan berdampak pada semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin, seperti fenomena yang terjadi di tahun 2017. Hal tersebut yang menyebabkan pencapaian rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Barat terbilang cukup kecil sehingga masih belum efektif dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan. Terlebih jika dipantau dari wilayah kediaman, penduduk yang berkediaman di wilayah kota cenderung mempunyai kualitas pembelajaran yang jauh lebih unggul dibandingkan penduduk yang tinggal di pedesaan.

Grafik 3. Jumlah Penduduk dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2020 (Jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan pada grafik di atas, terlihat bahwa pada periode 2015 sampai dengan 2020 jumlah penduduk pada Provinsi Kalimantan Barat telah terjadi penambahan secara substansial pada masing-masing periodenya. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah penduduk yang telah mencapai sebanyak 5.414.390 jiwa di tahun 2020, meningkat sebanyak 345.263 jiwa dibandingkan dengan tahun 2019 yang jumlahnya sebesar 5.069.127 jiwa. Salah satu penyebab terjadinya peningkatan jumlah penduduk pada provinsi tersebut disebabkan telah berada di tahap awal bonus demografi yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk selalu mengembangkan sumber daya manusia khususnya pada penduduk dengan usia produktif dari sisi pendidikan, kesehatan dan produktivitas yang secara tidak langsung akan mempengaruhi modal manusianya dalam proses pembangunan ekonomi. Berdasarkan dari proyeksi penduduk yang dilakukan oleh BPS, Kalimantan Barat akan mengalami bonus demografi di tahun 2020 dikarenakan lebih banyaknya jumlah penduduk yang berada pada usia produktif berumur 15 sampai dengan 64 tahun daripada penduduk dengan usia yang tidak produktif, dilihat dari rasio ketergantungannya yang telah mencapai sebesar 49,7 persen (BPS, 2013).

Menurut penelitian sebelumnya, jumlah penduduk menunjukkan adanya pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, menandakan semakin tinggi jumlah penduduk akan menyebabkan pembangunan ekonomi di suatu daerah semakin mudah untuk mencapai targetnya dalam mengurangi kemiskinan (Didu & Fauzi, 2016). Kondisi tersebut sama halnya dengan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, di mana berdasarkan grafik di atas diketahui jumlah penduduknya terjadi penambahan yang cukup substansial pada masing-masing periodenya, sedangkan jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut terjadi fluktuasi yang cenderung menurun pada setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa dengan adanya peningkatan jumlah penduduk justru memberikan dampak positif berupa menurunnya angka kemiskinan. Walaupun kemiskinan yang terdapat di Provinsi tersebut mengarah pada penurunan, menurut BPS pada beberapa periode belakangan ini penurunan kemiskinannya secara rata-rata mengalami perlambatan yang berkisar 0.89% sedangkan rata-rata pertambahan jumlah penduduknya jauh lebih cepat yaitu berkisar 2.5% bahkan lebih besar dari rata-rata pertambahan

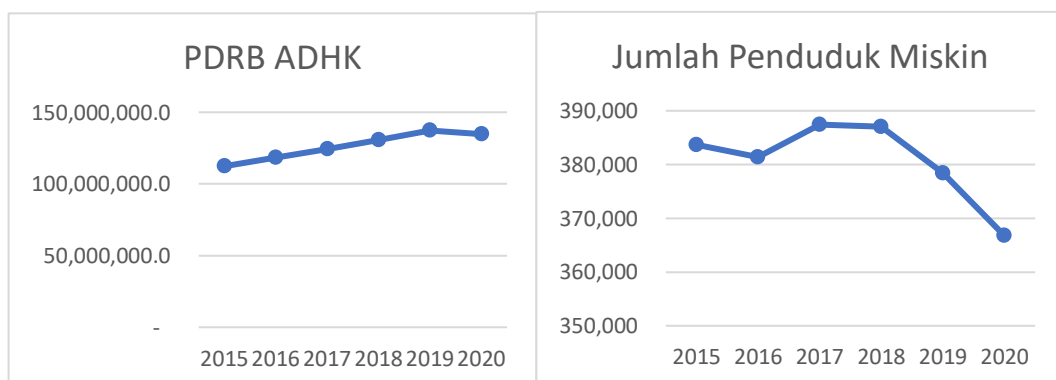
penduduk secara nasional beberapa tahun terakhir yang mencapai sebesar 1.12%. Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dan tidak terkendali dikhawatirkan akan mengakibatkan sulitnya mencapai target pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat serta penekanan pada angka kemiskinan. Pada dasarnya semakin banyak jumlah penduduk mampu berperan sebagai suatu faktor yang dapat mendukung pembangunan di suatu wilayah dikarenakan akan membuat jumlah tenaga kerja semakin tinggi dan dapat menekan angka pengangguran, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif apabila peningkatannya jumlah penduduknya tidak diimbangi dengan kualitasnya (Harefa, 2021).

Walaupun jumlah penduduk yang tinggi di Kalimantan Barat memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan, tetapi juga terdapat permasalahan berupa tidak meratanya persebaran penduduk antar kawasan kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, pedesaan dan perkotaan maupun daerah pesisir dan bukan. Berdasarkan hasil dari sensus nasional penduduk Kalimantan Barat tahun 2020, sebesar 6.14% atau sebanyak 0.33 juta penduduk tidak berkedudukan serasi dengan kartu keluarga. Hal tersebut menandakan migrasi yang dilakukan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya terbilang cukup tinggi (BPS, 2020). Tidak meratanya persebaran penduduk yang dapat terlihat pada jumlah penduduk yang menghuni daerah pesisir hampir sebanyak 50% dari total keseluruhan penduduk provinsi tersebut secara menyeluruh dibandingkan kepada daerah bukan pesisir yang relatif lebih sedikit jumlahnya selain dari Kota Pontianak. Tidak meratanya persebaran penduduk mampu dilihat dari jumlah penduduknya yang mendominasi di Kota Pontianak mencapai sebanyak 617.459 jiwa atau sebesar 12,7% dari jumlah keseluruhan penduduk Kalimantan Barat. Persebarannya yang tinggi di Kota tersebut disebabkan semakin bertambahnya infrastruktur seperti akses jalan, sanitasi dan air bersih yang tersedia dibandingkan dengan kota lainnya (Chairil, 2015).

Permasalahan lainnya yaitu dilihat dari angka kelahiran di suatu wilayah yang dapat memicu penambahan pada jumlah penduduk yang tinggi, dimana banyaknya jumlah kelahiran dapat dipengaruhi oleh masa reproduksi seorang wanita yang apabila masanya semakin panjang akan menyebabkan jumlah anak yang dilahirkan semakin tinggi. Berdasarkan hasil dari Susenas tahun 2020

terhadap Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, persentase wanita di bawah 16 tahun yang melakukan perkawinan pertama mencapai sebesar 14.25%, dimana angka tersebut lebih besar dari persentase wanita di bawah 16 tahun yang melakukan perkawinan pertama secara nasional yang mencapai sebesar 8.19%. padahal seseorang yang berusia dibawah 16 tahun masih dikatakan sebagai anak-anak yang masih belum siap secara fisik dan mental dalam membina keluarga. Semakin mudanya umur seseorang dalam melakukan pekawinan turut menjadi penyebab masa reproduksinya semakin panjang. hal tersebut tentunya selain memberikan dampak bagi kesehatan bayi dan ibu, akan menyebabkan tidak terkendalinya angka kelahiran dan akan menyebabkan jumlah penduduk akan semakin bertambah, sehingga dikhawatirkan akan memicu terjadinya berbagai permasalahan kependudukan yang akan membuat semakin besarnya beban daerah. Angka kelahiran yang tinggi juga berperan menjadi suatu faktor yang mampu mempengaruhi penambahan dan pengurangan penduduk di wilayah tertentu dan para pemangku jabatan juga perlu untuk memberikan program yang dapat mengontrol angka kelahiran tersebut. Hal ini disebabkan angka kelahiran menjadi tolak ukur terpenuhinya kesehatan masyarakat yang berujung pada tingkat kesejahteraan (Badan Pusat Statistik, 2019). Sehingga permasalahan tersebutlah yang menyebabkan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat masih terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan penurunan kemiskinannya.

Grafik 4. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Barat (Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan pada grafik di atas, terlihat bahwa pada periode 2015 sampai dengan 2020 PDRB pada Provinsi Kalimantan Barat telah terjadi peningkatan secara substansial pada masing-masing periodenya. Keadaan tersebut bisa dilihat dari PDRB yang telah mencapai sebesar 134,743,381.1 juta rupiah di tahun 2020, namun sempat mengalami penurunan sebesar 2.499.707,08 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang jumlahnya sebesar 137.243.088,2 juta rupiah yang diakibatkan dari adanya pandemi covid-19. Penyebab terjadinya peningkatan PDRB di Kalimantan Barat adalah tingginya peranan sektor usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dalam menggerakkan perekonomian daerah, mengingat bahwa Kalimantan Barat merupakan daerah agraris (BPS, 2021). Sektor usaha tersebut telah berperan besar dalam pembentukan PDRB yang mencapai sebesar 20.92 persen di tahun 2019 dan menjadi salah satu kategori lapangan usaha yang mendominasi struktur perekonomian PDRB Kalimantan Barat selama lima tahun terakhir. PDRB yang semakin tinggi di suatu wilayah akan memberikan potensi sumber penerimaan yang lebih besar dan berpengaruh terhadap peningkatan nilai tambah output pada seluruh kegiatan ekonomi.

Peningkatan output itu sendiri akan memberikan dampak berupa semakin bertambahnya penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan di suatu wilayah dan mengakibatkan angka kemiskinan semakin menurun. Apabila dipantau dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) pada bulan Agustus 2020, sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam menampung tenaga kerja terbanyak salah satunya adalah sektor agrikultur yaitu jumlah pekerja yang bekerja di sektor pertanian dan penyerapan terbesarnya berada di Kabupaten Landak sebesar 68.32% (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal tersebut menandakan bahwa kontribusi PDRB dari sektor agrikultur dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja bagi penduduk Provinsi Kalimantan dan akan menyebabkan pendapatan yang diterima akan semakin tinggi, sehingga berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin.

Menurut penelitian sebelumnya, PDRB menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan dan negatif terhadap kemiskinan dikarenakan telah berhasilnya program pembangunan secara efektif yang menyebabkan nilai PDRB mengalami peningkatan dan akan membuat tingkat kemiskinannya menurun (Mahgfirah, Amalia, & Novianti, 2019). Nurkse mengatakan dalam teorinya bahwa semakin

tinggi nilai PDRB akan berdampak pada semakin menurunnya angka kemiskinan. Kenyataannya hal tersebut sesuai dengan keadaan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, di mana pada peristiwa di atas ditunjukkan kalau PDRB telah mengalami penambahan yang cukup signifikan setiap tahunnya, sedangkan jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut telah terjadi fluktuasi yang cenderung menurun pada setiap tahunnya.

Walaupun PDRB di provinsi tersebut cenderung terjadi peningkatan dari periode ke periode, kontribusinya terhadap penurunan jumlah penduduk miskin masih dapat dikatakan kurang optimal mengingat rata-rata persentase penurunannya hanya berkisar 0.88% sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan kemiskinan nasional sebesar 0.82%. Berdasarkan Sinergi Pusat dan Daerah Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian PPN, Target yang ingin dicapai pada kemiskinan nasional sampai dengan tahun 2020 berkisar antara 8.5 sampai dengan 9 persen, sedangkan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2019 telah mencapai sebesar 7.49 persen. Hal tersebut tersebut tentunya sudah menjadi capaian yang baik bagi Provinsi Kalimantan Barat untuk memberantas masalah kemiskinan apabila dibandingkan dengan sasaran nasional. Walaupun demikian, tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat masih belum sesuai dengan harapan dan target, dimana target kemiskinan yang ditetapkan oleh pemangku kebijakan di provinsi tersebut ialah sebesar 6.92 persen. Tingkat Kemiskinan yang ada di wilayah tersebut seharusnya bisa mencapai ke angka yang lebih kecil daripada target yang ingin di capai, bahkan pemerintah Provinsi Kalimantan barat berupaya dan berharap agar tingkat kemiskinannya mencapai sebesar 5%. Tetapi terdapat 8 isu strategis yang masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Antara lain yaitu rendahnya kualitas SDM dan daya saing, birokrasi yang belum efektif, daya dukung hidup yang menurun, sarana dan prasarana yang minim, rendahnya kesejahteraan masyarakat, kesenjangan ekonomi yang besar, tidak terpadunya rencana sektor tata ruang, serta faktor keberagaman penduduk Kalimantan Barat yang masih cenderung rentan terhadap konflik sosial. Di sisi lain apabila dilihat dari garis kemiskinan, mengarah kepada terjadinya penambahan dari period eke periode yang mencapai sebesar Rp. 439,555 di tahun 2019, dimana

angka tersebut lebih besar dari garis kemiskinan secara nasional yang mencapai sebesar Rp. 425,250. Hal tersebut menandakan bahwa peningkatan PDRB terutama dilihat dari besarnya peranan sektor pertanian terjahap pembentukan PDRB disertai dengan tingginya penyerapan tenaga kerja terhadap sektor tersebut belum secara efektif dapat mengurangi kemiskinan di Kalimantan Barat dikarenakan garis kemiskinan yang semakin tinggi menyebabkan jumlah penduduk yang dikategorikan miskin masih terbilang cukup tinggi. Pada dasarnya peningkatan pada PDRB dapat mendukung seseorang agar dapat terbebas dari rantai kemiskinan, akan tetapi meskipun nilai PDRB di suatu wilayah tinggi tidak menjamin masyarakat akan semakin sejahtera dan dapat keluar dari garis kemiskinan terlebih lagi apabila wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk yang tinggi (Damanik & Sidauruk, 2020).

Apabila ditinjau dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Barat telah mencapai sebesar 68.51% dan angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan TPAK nasional yang mencapai sebesar 69.32%. walaupun TPAK di Kalimantan Barat hampir menyamai angka nasional, tetapi angkanya cenderung mengalami penurunan di beberapa tahun sebelumnya yang disebabkan adanya kecenderungan bagi generasi muda yang telah menyelesaikan pendidikan untuk mencari pekerjaan yang layak sesuai dengan keinginan, sedangkan ketersediaan kesempatan kerja di wilayah perkotaan jumlahnya sangat terbatas mengingat bahwa sektor yang telah menampung banyak tenaga kerja secara keseluruhan ialah sektor agrikultur (BPS, 2017). Sektor tersebut didominasi oleh masyarakat yang bertempat tinggal dipedesaan dan jumlah penduduk yang berpendapatan rendah di bawah rata-rata cenderung lebih besar pada wilayah pedesaan. Hal tersebutlah yang menyebabkan pengangguran semakin meningkat lantaran banyaknya generasi muda yang masih belum mendapatkan pekerjaan dan akan berdampak pada jumlah penduduk miskin yang masih terbilang cukup tinggi. Nilai TPAK yang semakin tinggi, maka proporsi penduduk usia kerja yang berkontribusi pada kegiatan produktif dalam menghasilkan barang dan jasa akan semakin tinggi dan akan tercermin dari tingkat PDRB yang lebih tinggi, hingga akan memberikan pengaruh substansial pada pengurangan tingkat kemiskinan.

Sesuai dengan latar belakang beserta adanya fenomena yang sudah penulis rincikan, oleh sebabnya penulis berkeinginan untuk mengembangkan dan menggarap penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Pendidikan, Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2020”**.

I.2 Perumusan Masalah

Permasalahan kemiskinan yang berlangsung pada Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat dari jumlah penduduk miskinnya yang cenderung berfluktuasi pada setiap tahunnya dan menempati peringkat pertama dengan jumlah penduduk tertinggi diantara provinsi lainnya terdapat pada Pulau Kalimantan. Apabila ditinjau dari lamanya pendidikan formal yang dijalankan masyarakat secara rata-rata dan PDRB yang bertambah secara signifikan di periodenya telah menyebabkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat Menurun. Tetapi tentunya masih terdapat permasalahan berupa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan besarnya peranan sektor pertanian terhadap PDRB belum secara efektif dapat mengurangi kemiskinan di Kalimantan Barat. Terlebih lagi dengan semakin banyaknya jumlah penduduk yang diakibatkan sedang berada di awal tahap bonus demografi beserta tingginya angka kelahiran di usia muda menyebabkan masyarakat yang berpendapatan rendah di bawah rata-rata atau miskin di provinsi tersebut masih terbilang cukup tinggi. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah fenomena yang dapat dibentuk menjadi sebuah rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat?
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat?
4. Bagaimanakan pengaruh rata-rata lama sekolah, jumlah penduduk dan PDRB secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat?

I.3 Tujuan Penelitian

Bersandar pada perumusan masalah yang diterangkan di atas, tujuan dan maksud daripada penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat
2. Untuk mengetahui pengaruh dari jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh rata-rata lama sekolah, jumlah penduduk dan PDRB secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat.

I.4 Manfaat Penelitian

Dengan digarapkannya penelitian ini diharapkan dapat mempersembahkan beberapa manfaat yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya penelitian ini mampu meluaskan wawasan serta kepandaian untuk digunakan sebagai bahan penelitian berikutnya dan diharapkan mampu menjadi bahan pengembangan pada bidang yang diteliti pada penelitian ini yaitu ekonomi pembangunan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Harapannya penelitian ini bisa berperan sebagai bahan yang mampu dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk merealisasikan kebijakan dan mengambil keputusan mengenai permasalahan kemiskinan

- b. Bagi Masyarakat dan Mahasiswa

Harapannya penelitian ini mampu menjadi sumber pengetahuan dan wawasan untuk dapat berbagi ilmu dengan sesama serta menjadi acuan

referensi dalam mengembangkan penelitian yang ingin dilakukan oleh masyarakat maupun mahasiswa mengenai permasalahan kemiskinan.

c. Bagi Peneliti

Harapannya penelitian ini mampu memperluas pemahaman dan pengetahuan tentang variabel yang diteliti yaitu rata-rata lama sekolah, jumlah penduduk dan PDRB beserta teori-teorinya yang dapat diimplementasikan secara langsung di kehidupan nyata.